



Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Tanggal: 13 Mei 2026

Halaman: 5

► PERLINDUNGAN ANAK

Pemkot Biayai Relokasi Anak Korban Daycare

UMBULHARJO—Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menanggung biaya relokasi puluhan anak korban kasus Daycare Little Aresha ke tempat penitipan lain yang dinilai lebih aman. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pembenahan sistem perizinan daycare di Kota Jogja agar kasus serupa tidak terulang.

Aria Fajar Hilayat
ariafajar@harianjogja.com

Sebanyak 88 anak telah dipindahkan ke 39 lokasi alternatif, baik Tempat Penitipan Anak (TPA) maupun Kelompok Bermain (KB) di Kota Jogja. Selama masa transisi pada Mei hingga Juni 2026, biaya penitipan seluruh anak ditanggung Pemkot.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota (DP3AP2KB) Kota Jogja, Retnaningtyas, mengatakan relokasi dilakukan agar orang tua tetap dapat bekerja tanpa terbebani biaya tambahan maupun rasa khawatir terhadap keamanan anak. "Untuk biaya selama dua bulan yakni Mei dan Juni ditanggung Pemkot Jogja," ujar Retnaningtyas, Selasa (12/5).

Selain relokasi, Pemkot juga memberikan pendampingan intensif kepada anak dan keluarga korban. Pendampingan mencakup layanan psikologis, penanaman tumbuh kembang anak, hingga bantuan hukum bagi keluarga terdampak.

Untuk mempercepat pemulihan trauma, Pemkot melibatkan 94 psikolog dari berbagai unsur, mulai dari UPT PPA, Ikatan Psikolog Klinis, rumah sakit, hingga puskesmas. Orang tua korban juga mendapat psikotes agar tidak mengalami trauma berkepanjangan setelah kasus daycare tersebut mencuat.

Perizinan Daycare

Di sisi lain, Pemkot mulai mendata seluruh daycare, TK, dan KB di Kota Jogja. Hasil sementara menunjukkan terdapat

► Relokasi dilakukan agar orang tua tetap dapat bekerja tanpa terbebani biaya maupun khawatir terhadap keamanan anak.

► Pendampingan mencakup layanan psikologis, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga bantuan hukum.

68 daycare, dengan rincian 37 daycare sudah berizin, dan 31 lainnya belum memiliki izin operasional.

Menurut Retnaningtyas, sebagian daycare yang belum berizin merupakan pengembangan dari lembaga pendidikan yang telah memiliki izin seperti TK maupun KB. Meski belum mengantongi izin operasional, sejumlah daycare telah memenuhi standar dasar kelayakan, mulai dari tenaga pengasuh, keamanan, hingga fasilitas pendukung. Beberapa daycare bahkan telah memasang CCTV sebagai bentuk transparansi kepada orang tua.

Pemkot kini mendorong seluruh pengelola daycare yang sudah memenuhi syarat untuk segera mengurus izin operasional. Langkah tersebut diperkuat dengan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jogja yang mencatat adanya 43 usaha daycare dalam sistem OSS.

Kepala DPMPTSP Kota Jogja, Budi Santosa, mengatakan dari 43 daycare, sebanyak 28 usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional, sedangkan 15 usaha lainnya baru memiliki NIB tanpa izin operasional daerah. Dia menegaskan penyelenggara daycare wajib memenuhi dua tahapan perizinan, yakni mengurus NIB melalui sistem OSS serta izin operasional pendidikan nonformal yang diverifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja. "Progres tindak lanjut perizinan daycare selama periode 24 April hingga hari ini ada sembilan permohonan izin yang masuk. Kemudian ada tiga pelaku usaha yang melakukan konsultasi izin operasional pendidikan nonformal di Loket Kliperinvest Mal Pelayanan Publik," ujarnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005